

## **Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jambi**

**\*Igo Septa Saputra; Zulfanetti; Jaya Kusuma Edi**

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*\*E-mail korespondensi: igoseptasapvtra19@gmail.com*

### **Abstract**

*This research aim to: First, analyze the development of labor force participation rate, minimum wages, consumer price index and gross regional domestic product in Jambi Province. This study use time series data between 2000-2017 with data analysis method used namely quantitative descriptive analysis and Ordinary Least Square (OLS) method. Based on the result of data processing using the OLS method in multiple regression equations in 2000-2017 results were obtained. That the average development of the labor force participation rate, minimum wage, consumer price index and gross regional domestic product fluctuative from year to year. Based on processing data obtained results: (1) Consumer price index variable have a positive and not significant effect on labor force participation rate in Jambi Province; (2) The variable minimum wages and gross regional domestic product have a positive and significant effect on minimum wages in Jambi Province.*

**Keywords:** *Labor Force Participation Rate, Minimum Wages, Consumer Price Index, and Gross Regional Domestic Product.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menganalisis perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum provinsi, indeks harga konsumen dan produk domestik regional bruto di Provinsi Jambi. Kedua, menganalisis pengaruh upah minimum provinsi, indeks harga konsumen dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu (*time series*) antara tahun 2000-2017 dengan metode analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif kuantitatif dan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode OLS dalam persamaan regresi berganda pada tahun 2000-2017 diperoleh hasil. Bahwa rata-rata perkembangan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks harga konsumen dan produk domestik regional bruto berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil: (1) Variabel indeks harga konsumen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi; (2) Variabel upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi.

**Kata Kunci:** *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Harga Konsumen, dan Produk Domestik Regional Bruto.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional memiliki kaitan erat dengan masalah kependudukan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat yaitu pertama, pertumbuhan penduduk dinegara berkembang cenderung tinggi sehingga melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, demografi lebih muda sehingga lebih banyak penduduk yang masuk lapangan pekerjaan. Ketiga, struktur industri di negara berkembang cenderung mempunyai deversifikasi kegiatan ekonomi rendah serta keterampilan penduduk belum memadai membuat usaha penciptaan lapangan pekerjaan menjadi semakin kompleks. Tenaga kerja sebagai salah satu dari faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan dan juga merupakan konsumsi hasil pembangunan itu sendiri, dimana secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan. Kondisi perkembangan tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan, banyak orang yang bekerja semata-mata dengan berbagai macam tujuan, namun yang menjadi tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi masih terdapat pula masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang tidak menunjang diantaranya strata pendidikan yang tidak sesuai harapan perusahaan atau instansi yang ada, dan di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala seperti perkembangan jumlah angkatan kerja namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup dan membuat partisipasi angkatan kerja menurun. Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja.

Tenaga kerja juga sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah seperti di Provinsi Jambi yang merupakan sasaran dari penduduk yang berada diluar daerah untuk mencari pekerjaan, dikarenakan begitu banyak lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Provinsi Jambi baik di instansi pemerintah ataupun swasta. Definisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa TPAK Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2013 TPAK di Provinsi Jambi sebesar 62.65 persen dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 4.69 persen menjadi 65.59. dan kembali mengalami peningkatan ditahun 2015 sebesar 66.14 persen dengan perkembangan sebesar 0.83 persen. Ditahun 2016 kembali lagi mengalami peningkatan sebesar 2.11 persen dengan nilai TPAK sebesar 67.54 akan tetapi pada tahun 2017

TPAK di Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 0.02 persen dengan nilai TPAK sebesar 67.52 persen. Untuk dapat mengetahui perkembangan TPAK di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Perkembangan TPAK, UMP, IHK dan PDRB di Provinsi Jambi 2013-2017

Tahun	TPAK	UMP	IHK	PDRB
2013	62.65	1.300.000	146.45	21.979.277
2014	65.59	1.502.300	113.61	23.390.000
2015	66.14	1.710.000	119.44	24.202.161
2016	67.54	1.906.650	124.01	25.534.044
2017	67.52	2.063.948	130.52	26.205.803

Sumber: Badan Pusat Statistik 2013-2017

Peningkatan TPAK yang terjadi di Provinsi Jambi terjadi dikarenakan didorong oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya upah minimum Provinsi. Upah yang akan diterima oleh para tenaga kerja bergantung pada jumlah tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Data mengenai kenaikan upah di berbagai negara, terutama negara maju maupun negara berkembang menunjukkan bahwa berkaitan erat antara kenaikan upah para pekerja dengan kenaikan produktivitas. Dalam kenaikan produktivitas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yakni adanya kemajuan teknologi memproduksi, perbaikan sifat-sifat tenaga kerja, dan perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat (Sukirno, 2012).

Untuk mengetahui perkembangannya berikut ini dapat kita lihat data mengenai upah minimum Provinsi Jambi lima tahun terakhir yaitu pada periode tahun 2013-2017 dilihat dari data Tabel 1 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perkembangan upah minimum Provinsi Jambi mengalami naik turun setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2013 upah minimum di Provinsi Jambi sebesar Rp. 1.300.000 perkembangannya mengalami peningkatan sebesar 13.79 persen dari upah minimum tahun sebelumnya, pada tahun 2014 upah minimum mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.502.300 dengan perkembangan sebesar 15.56 persen. Dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar Rp. 1.906.650 dengan perkembangan 11.50 persen. Ditahun 2017 kembali lagi mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.063.948 tetapi perkembangannya mengalami penurunan sebesar 8.24 persen.

Penetapan upah minimum tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja, dan penentuan besarnya mengacu kepada terpenuhinya kebutuhan hidup layak. Selain faktor upah minimum Provinsi terdapat pula beberapa faktor lain yang mempengaruhi TPAK diantaranya indeks harga konsumen. Untuk dapat melihat perkembangan indeks harga konsumen lima tahun terakhir yaitu periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 1 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa indeks harga konsumen provinsi jambi berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2013 indeks harga konsumen di Provinsi Jambi sebesar 146.45 persen sedangkan pada tahun 2014 indeks harga konsumen mengalami penurunan sebesar -20.65 persen dengan nilai angka indeks harga konsumen sebesar 113.61 hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2014 IHK

disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2012 dan mencakup 82 kota yang terdiri dari 33 ibu kota provinsi dan 49 kota-kota besar di seluruh Indonesia sedangkan IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007 dan hanya mencakup 66 kota. Kemudian mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2017 yaitu sebesar 5.24 persen dengan angka indeks harga konsumen sebesar 130.52

Selain menggunakan indeks harga konsumen, produk domestik regional bruto juga digunakan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi. Produk domestik regional bruto sangat berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja apabila nilai produk domestik regional bruto meningkat maka jumlah output atau penjualan dalam seluruh kegiatan ekonomi akan meningkat sehingga semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1 dimana pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi sebesar 7.07 persen dengan nilai produk domestik regional bruto sebesar Rp. 21.979.277 pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 4.21 persen dengan nilai produk domestik regional bruto sebesar Rp. 25.534.044 kemudian pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 4.64 persen dengan angka produk domestik regional bruto sebesar Rp. 26.205.803.

## METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Untuk menganalisis perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks harga konsumen dan produk domestik regional bruto di Provinsi Jambi dilakukan secara deskriptif. Untuk menganalisis pengaruh indeks harga konsumen, upah minimum dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda. Berikut adalah persamaan model regresi linier berganda:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Dimana:

Y	= Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)
$\beta_0$	= Bilangan konstanta
$X_1$	= Upah minimum (rupiah)
$X_2$	= Indeks harga konsumen (persen)
$X_3$	= Produk domestik regional bruto (rupiah)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
$\mu$	= Standar error

Untuk mengetahui derajat kepekaan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi digunakan konsep elastisitas. Besarnya nilai elastisitas dalam model ini dapat diketahui langsung besarnya nilai koefisien regresi variabel-variabel pendugaannya (Gujarati, 2003).

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil regresi dari model yang digunakan, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik model OLS, sehingga model tersebut layak digunakan. Tujuannya agar diperoleh penaksiran yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pengujian ini dimaksudkan

untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi dan normalitas pada hasil estimasi, karena apabila terjadi penyimpangan maka uji t dan uji F yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid.

### **Uji Multikolinearitas**

Pada mulanya multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Perbedaan ini jarang diperhatikan dalam praktek, dan multikolinearitas berkenaan dengan kedua kasus tadi. Multikolinearitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan *Variance Inflation Factors*.

### **Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heterokedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heterokedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien. Cara mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity consistent standard errors and covariance* yang tersedia dalam program Eviews. Uji ini diterapkan pada hasil regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah F dan *Obs\*Rsquared*.

### **Uji Autokorelasi**

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan pengganggu dari periode tertentu ( $\mu$ ) berkorelasi dengan kesalahan pengganggu dari periode sebelumnya ( $\mu-1$ ). Pada kondisi ini kesalahan pengganggu tidak bebas tetapi satu sama lain saling berhubungan mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan Uji *Langrange Multiplier* (LM test).

### **Uji Normalitas**

Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-Berra test*. Pedoman dari JB test adalah apabila nilai probabilitas JB hitung < nilai probabilitas maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah berdistribusi normal ditolak. Apabila nilai probabilitas JB hitung > nilai probabilitas maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah berdistribusi normal diterima (Gujarati, 2003).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jambi**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun

atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi (Simanjuntak, 2003).

Selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2017, perkembangan TPAK Provinsi Jambi mengalami perkembangan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Pada kenyataannya perkembangan meningkat TPAK Provinsi Jambi tidak ada yang melebihi 5 persen pertahun, sedangkan perkembangan menurun TPAK Provinsi Jambi ada yang mencapai -6.44 persen. Jika dirata-rata perkembangan TPAK Provinsi Jambi hanya sebesar 0.42 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jambi (2000-2017)

Tahun	TPAK (Persen)	Perkembangan (%)
2000	65.65	-
2001	67.68	3.09
2002	68.00	4.72
2003	67.91	-1.32
2004	67.25	-0.97
2005	68.69	2.14
2006	64.26	-6.44
2007	65.18	1.43
2008	65.95	1.18
2009	66.65	1.06
2010	66.38	-0.04
2011	67.67	1.94
2012	65.07	-3.84
2013	62.65	-3.71
2014	65.59	4.69
2015	66.14	0.83
2016	67.54	2.11
2017	67.52	-0.02
<b>Rata-rata</b>		<b>0.42</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2019 (diolah)

Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 18 tahun perkembangan TPAK Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Dimana rata-rata TPAK Provinsi Jambi berkembang hanya sebesar 0.42 persen setiap tahunnya. Adapun jumlah angka TPAK tertinggi tercatat pada tahun 2005 yaitu mencapai 68.69 persen atau berkembang sebesar 2.14 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 67.25 persen. Selanjutnya pada tahun 2006 TPAK mengalami penurunan terbesar selama 18 tahun terakhir yaitu mencapai -6.45 persen. sedangkan angka TPAK terkecil tercatat pada tahun 2013 yaitu sebesar 62.65 persen.

#### **Perkembangan upah minimum di Provinsi Jambi**

Sesuai undang– undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa penetapan upah minimum dapat dipastikan akan lebih besar atau setidaknya sama dengan upah minimum tahun sebelumnya. Pada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menegaskan bahwa Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK). Ketetapan UMP ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, sedangkan ketetapan

upah minimum Kabupaten/Kota ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Untuk meninjau terhadap besarnya UMP dan UMK diadakan satu tahun sekali.

Berdasarkan data yang sudah dilansir bahwasanya perkembangan upah minimum provinsi jambi selalu meningkat setiap tahun. Ini dikarenakan nilai kebutuhan hidup layak dan pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi juga meningkat. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sebagai lembaga independen dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum provinsi tahun yang akan datang. Dewan pengupahan terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai wakil dari pengusaha, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja dan pakar praktisi dari Perguruan Tinggi yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah. Semua pihak yang berwenang bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum Provinsi Jambi yang berlaku pada saat tertentu dan menuntaskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya dinaikkan atau belum.

Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 upah minimum Provinsi Jambi sudah lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Sumatera, seperti Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp. 1.811.000 perbulan, Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 1.800.725 perbulan, Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 1.605.000 perbulan dan Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.763.000 perbulan. Fenomena ini dimungkinkan karena pada tahun 2017 kondisi politik dan perekonomian Provinsi Jambi dalam keadaan stabil, sehingga tidak ada unsur demonstrasi dari pihak buruh terhadap upah minimum Provinsi Jambi, hal ini juga dimungkinkan karena pada tahun 2017 upah minimum Provinsi Jambi sudah melampaui kebutuhan hidup layak bagi para buruh.

**Tabel 3.** Perkembangan upah minimum Provinsi Jambi (2000-2017)

Tahun	UMP (Rupiah)	Perkembangan (%)
2000	173.000	-
2001	245.000	41.61
2002	304.000	24.08
2003	390.000	28.29
2004	425.000	8.97
2005	485.000	14.12
2006	563.000	16.08
2007	658.000	16.87
2008	724.000	10.03
2009	800.000	10.5
2010	900.000	12.5
2011	1.028.000	14.22
2012	1.142.500	11.14
2013	1.300.000	13.79
2014	1.502.300	15.56
2015	1.710.000	13.83
2016	1.906.000	11.50
2017	2.063.948	8.24
<b>Rata-rata</b>		<b>15.96</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2019 (diolah)

Upah Minimum Provinsi adalah suatu ketetapan dari pemerintah daerah dalam penentuan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang diberlakukan di daerah Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya data dapat dilihat pada Tabel 3 perkembangan upah minimum di Provinsi Jambi pada umumnya mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yang salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB yang cenderung mengalami kenaikan. Selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2017 terlihat bahwa perkembangan kenaikan UMP yang terbesar terjadi pada tahun 2001 yaitu mencapai 41.61 persen. Dimana pada saat itu pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan disanalah terjadinya peningkatan terhadap karyawan – karyawan yang berbagai golongan yang telah disediakan oleh perusahaan tersebut. Pada tahun 2003 terus terjadi peningkatan dengan perkembangan sebesar 28.29 persen dan perkembangan paling rendah untuk upah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 8.24 persen.

#### **Perkembangan indeks harga konsumen di Provinsi Jambi**

Indeks Harga Konsumen adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi. IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. Pemerintah Provinsi Jambi selalu berusaha dapat menekan inflasi pada harga yang terjangkau untuk masyarakat. Selama periode 2000 sampai dengan 2017, perkembangan IHK Provinsi Jambi mengalami perkembangan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Namun pada tahun 2004 IHK mengalami penurunan. Dimana penurunan yang sangat ekstrim terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar -56.82 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Jambi (2000-2017)

<b>Tahun</b>	<b>IHK (Persen)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2000	202.74	-
2001	223.64	10.30
2002	250.07	11.81
2003	265.45	6.15
2004	114.61	-56.82
2005	126.40	10.29
2006	143.31	13.38
2007	158.19	10.43
2008	110.70	-13.48
2009	115.84	-1.4
2010	123.40	6.53
2011	130.71	8.18
2012	136.62	4.22
2013	146.45	8.74
2014	113.61	-20.65
2015	119.44	1.37
2016	124.02	3.75
2017	130.52	5.24
<b>Rata-rata</b>		<b>0.47</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2019 (diolah)



Pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 17 tahun, perkembangan IHK Provinsi Jambi mengalami fluktuasi. Dimana rata-rata IHK Provinsi Jambi berkembang sebesar 0.47 persen setiap tahunnya. Adapun jumlah angka IHK tertinggi terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 265.46 atau berkembang sebesar 6.15 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 250.07 kemudian pada tahun 2004 IHK Provinsi Jambi tercatat mengalami penurunan yang sangat ekstrim, yaitu mencapai 114.61 atau sebesar -56.82 persen. Fenomena ini terjadi karena mulai dari tahun 2004 ke atas perhitungan IHK mencakup 283-397 jenis komoditas barang dan jasa per kabupaten/kota, sedangkan pada tahun 2003 ke bawah perhitungan IHK mencakup lebih sedikit komoditas barang dan jasa yaitu sebanyak 249-353 komoditas per Kabupaten/Kota. pada tahun 2013 IHK mengalami kenaikan sebesar 7.19 persen dengan nilai IHK sebesar 146.45 tetapi di tahun berikutnya pada tahun 2014 IHK mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai angka -20.65 persen hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2014 IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2012 dan mencakup 82 kota yang terdiri dari 33 ibu kota provinsi dan 49 kota – kota besar di seluruh Indonesia sedangkan IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007 dan hanya mencakup 66 kota.

### **Perkembangan produk domestik regional bruto di Provinsi Jambi**

PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. PDRB di hitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas harga dasar konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar, penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional.

Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan antara lain:

#### 1. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing – masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh unit produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaanya dalam proses produksi.

#### 2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan pajak dan pajak tak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

#### 3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen-komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

PDRB sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan

pertumbuhan ekonominya, income perkapita dan berbagai instrument ekonomi lainnya. Dimana dengan adanya data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak salah arah. Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

**Tabel 5.** Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi (2000-2017)

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2000	9.569.242	-
2001	10.205.590	5.87
2002	10.803.423	5.86
2003	11.343.280	5.00
2004	11.953.885	5.38
2005	12.619.971	5.57
2006	13.363.621	5.89
2007	14.275.161	6.82
2008	15.297.771	7.16
2009	16.272.259	6.39
2010	17.471.686	7.35
2011	18.963.518	8.54
2012	20.373.533	7.03
2013	21.979.277	7.07
2014	23.309.000	7.76
2015	24.202.161	4.21
2016	25.534.044	4.37
2017	26.205.803	4.64
<b>Rata-rata</b>		<b>6.17</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2019 (diolah)

Dari Tabel 5, menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Provinsi Jambi dari tahun 2000-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 6.17 %. Perkembangan yang paling tinggi terjadi di tahun 2011 sebesar 8.54 % hal ini terjadi dikarenakan memadainya infrastruktur yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya yang membuat jalannya perekonomian di Provinsi Jambi membaik dari perbaikan jalan maupun informasi. Hal ini membuat lancarnya kegiatan ekonomi. Dan pertumbuhan yang terendah terjadi di tahun 2003 yaitu sebesar 5.00 %. Selama kurun waktu dari tahun 2005-2008 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi semakin tahun semakin meningkat dari 5.57 % di tahun 2005 dan ditahun 2007 menjadi 6.82 % sampai dengan tahun 2008 terus meningkat menjadi 7.16 %. Dan ditahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi berfluktuatif, hingga pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi mengalami penurunan menjadi sebesar 4.64 %.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas merupakan salah satu model asumsi klasik yang melihat hubungan antara sesama variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat juga dari *Tolerance and Variance Inflation Factors (VIF)*. *VIF* mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksir (estimator) meningkat seandainya ada multikolinearitas

dalam suatu model empiris. Dengan demikian, bila kolinearitas meningkat, maka varian dari penaksir akan meningkat dalam limit yang tak terhingga (Junaidi, 2012). Untuk melihat hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Hasil uji multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	22.93940	208.6281	NA
UMP	1.88E-07	195.6289	4.12206
IHK	8.04E-05	18.49192	1.65955
PDRB	2.18E-09	622.5613	4.42890

Sumber: Data diolah, 2019

Dari Tabel 6, dapat dilihat nilai dari pengujian menggunakan VIF minimal dibawah 5%, jika pengujian lebih dari 5 % maka mengandung gejala multikolinieritas. Hasil dari VIF pada ketiga variabel dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinieritas dimana VIF UMP sebesar  $4.12206 < \alpha = 5\%$  berarti UMP terbebas dari gejala multikolinieritas, VIF IHK sebesar  $1.65955 < \alpha = 5\%$  berarti IHK terbebas dari gejala multikolinieritas, VIF PDRB sebesar  $4.42890 < \alpha = 5\%$  berarti PDRB terbebas dari gejala multikolinieritas. Dapat disimpulkan bahwa pengujian ini terbebas dari gejala multikolinieritas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heterokedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heterokedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien. Cara mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *white heterocedasticity consistent standard errors and covariance* yang tersedia dalam program Eviews. Uji ini diterapkan sebagai hasil regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah F dan *Obs\*Rsquared*.

**Tabel 7.** Hasil uji heterokedastisitas

F-statistic	0.877930	Prob. F(3,14)	0.5784
Obs*R-squared	8.944175	Prob. Chi-Square(3)	0.5324
Scaled explained SS	4.724785	Prob. Chi-Square(3)	0.8576

Sumber: Data diolah, 2019

Dari perhitungan menggunakan *Eviews 9* didapatkan hasil *Prob-Chi Square* dalam penelitian ini adalah  $(0.5324) > \alpha = 5\%$  maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.

#### Uji Autokorelasi

Korelasi dapat terjadi di serangkaian pengamatan dari data yang diperoleh pada suatu waktu tertentu, data tersebut biasa saja data seksi silang (*cross section*) atau data

yang diurutkan menurut waktu (*time series*). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah dengan LM test. Caranya apabila nilai *Prob-Chi Square*  $> \alpha = 5\%$  maka tidak ada masalah autokorelasi. Untuk melihat ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8.** Hasil uji autokorelasi

F-statistic	0.383291	Prob. F(2,12)	0.6897
Obs*R-squared	1.080828	Prob. Chi-Square(2)	0.5825

Sumber: Data diolah, 2019

Dari perhitungan menggunakan *Eviews 9* didapatkan hasil *Prob-Chi Square* dalam penelitian ini adalah  $(0.5825) > \alpha = 5\%$  maka tidak ada masalah autokorelasi.

### Uji Normalitas

Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-Berra test*. Pedoman dari J-B test adalah apabila nilai probabilitas J-B hitung  $<$  nilai probabilitas  $\alpha$  (0.05) maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah berdistribusi normal ditolak. Apabila nilai probabilitas J-B hitung  $>$  nilai probabilitas  $\alpha$  (0.05), maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pengganggu adalah berdistribusi normal diterima (Gujarati. 2003). Dari hasil perhitungan, didapatkan nilai statistik JB sebesar  $0.611972 <$  dari nilai  $X^2$  tabel yaitu dengan  $0.736397 < \alpha = 5\%$ . Dengan nilai  $JB < X^2$  tabel maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### Uji Hipotesis

#### Uji Signifikan Statistik Secara Simultan ( Uji F )

Pengujian secara simultan digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel upah minimum, indeks harga konsumen dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi. dengan F-hitung sebesar 2.077647 dengan probabilitas sebesar 0.049246 atau lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0.05$  ( $0.049246 < 0.05$ ) artinya  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima pada tingkat keyakinan 63%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum Provinsi, indeks harga konsumen dan produk domestik regional bruto secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi.

#### Uji Signifikan Statistik Secara Parsial ( Uji T )

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas ( upah minimum, indeks harga konsumen, dan PDRB) secara individu berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi maka dilakukan pengujian secara parsial, yaitu sebagai berikut:

#### Variabel upah minimum

Uji t statistik untuk variabel upah minimum secara parsial diketahui t hitung sebesar 2.216929. Hal ini berarti bahwa variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi. Probabilitas upah minimum dalam penelitian ini adalah sebesar  $0.0437 < \alpha = 5\%$  berarti variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi selama periode 2000 – 2017.

**Variabel indeks harga konsumen**

Uji t statistik untuk variabel indeks harga konsumen secara parsial diketahui t hitung sebesar 0.042898. Hal ini berarti variabel indeks harga konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi. Probabilitas indeks harga konsumen dalam penelitian ini adalah sebesar  $0.9664 > \alpha = 5\%$  berarti variabel indeks harga konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi selama periode 2000 – 2017.

**Variabel produk domestik regional bruto**

Uji t statistik untuk variabel produk domestik regional bruto secara parsial diketahui t hitung sebesar -2.256355. Hal ini berarti bahwa variabel produk domestik regional bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap upah minimum di Provinsi Jambi. Probabilitas produk domestik regional bruto dalam penelitian ini adalah  $0.0406 < \alpha = 5\%$  berarti variabel produk domestik regional bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap upah minimum di Provinsi Jambi selama periode 2000 – 2017.

**Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (upah minimum, indeks harga konsumen dan PDRB) dalam menerangkan variasi variabel dependen tingkat partisipasi angkatan kerja (Widarjono, 2013). Dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.63 hal ini menunjukkan bahwa upah minimum, indeks harga konsumen dan produk domestik regional bruto mampu mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi sebesar 63 persen. Sedangkan sisanya sebesar 37 persen dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian

**KESIMPULAN DAN SARAN****Kesimpulan**

Rata-rata perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jambi sebesar 0.42 persen setiap tahunnya. Rata-rata perkembangan upah minimum Provinsi Jambi 15.96 persen pertahun, rata-rata perkembangan indeks harga konsumen 0.47 persen pertahun dan rata-rata perkembangan produk domestik regional bruto di Provinsi Jambi sebesar 6.17 persen pertahun. Dilihat dari hasil regresi dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi. Sementara itu, indeks harga konsumen tidak berpengaruh signifikan.

**Saran**

Pemerintah perlu membuat berbagai pelatihan khusus yang mampu membuat tenaga kerja memiliki kemampuan di bidangnya dan perluasan kesempatan kerja guna menyerap tenaga kerja yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya disarankan dapat menemukan variabel-variabel lain yang pengaruhnya lebih nyata agar nilai-nilai signifikansi menjadi lebih baik dan spesifikasi model mendekati kenyataan yang sebenarnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amir Amri, Junaidi, dan Yulmardi. (2012). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPB PRESS.

- Badan Pusat Statistik. (2000-2017). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*, Provinsi Jambi: Jambi.
- Badan Pusat Statistik. (2000-2017). *Upah Minimum*, Provinsi Jambi: Jambi.
- Badan Pusat Statistik. (2000-2017). *Indeks Harga Konsumen (IHK)*, Provinsi Jambi: Jambi.
- Badan Pusat Statistik. (2000-2017). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*. Provinsi Jambi: Jambi.
- Bonerri, Kadek Bogan. (2018). Pengaruh Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 18 (1) 35-36.
- Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrika Dasar*. Terjemah Sumarno Zein. Erlangga: Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman J. (2003). *Produktivitas Tenaga Kerja Pengertian dan Ruang Lingkupnya*. Prisma: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika: Teori Pengantar dan Aplikasinya Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonosia FE UII: Yogyakarta.